

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT Kabupaten Kutai Timur

# 2017



# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kabupaten Kutai Timur

2017



# **INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KUTAI TIMUR 2017**

ISBN: -

Nomor Publikasi: 64040.1826

Katalog: 4102004.6404

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: xiv+ 90 Halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Timur

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Timur

Infografis:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Timur

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Timur

Dicetak Oleh:

CV.

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

**TIM PENYUSUN**

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR 2017**

**Pengarah**

Ach. Yasid Wijaya, S.E.

**Penanggungjawab**

Rizka Maulina, SST, M.Si

**Penyunting**

Rizka Maulina, SST, M.Si

**Penulis**

Eka Widi Handayani, S.Si.

Fiki Novitasari, S.E.

Kurnia Wahyu Sahfitri, SST

**Pengolah Data**

Eka Widi Handayani, S.Si.

Fiki Novitasari, S.E.

Kurnia Wahyu Sahfitri, SST

**Desain/Layout & Gambar Kulit:**

Rizka Maulina, SST, M.Si.

Kurnia Wahyu Sahfitri, SST



## Kata Pengantar

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 ini merupakan lanjutan dari publikasi sebelumnya yang dirilis setiap tahunnya. Publikasi ini menyajikan data yang dikumpulkan langsung oleh BPS (Data Primer) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) serta data yang berasal dari instansi lain (Data Sekunder), dengan maksud untuk memberikan gambaran umum keadaan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kutai Timur.

Publikasi ini menyajikan informasi dasar yang meliputi enam bidang, yaitu Kependudukan; Kesehatan; Pendidikan; Ketenagakerjaan; Pengeluaran Rumah Tangga dan Kemiskinan serta Perumahan.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga terbitnya publikasi ini disampaikan ucapan terima kasih. Saran dan kritik yang konstruktif sangat kami hargai untuk perbaikan publikasi yang akan datang.

Sangatta, NoVember 2018  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Kutai Timur,



Ach. Yasid Wijaya, SE  
NIP. 19641026 199401 1 001



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	xiii
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	4
1.3. Metodologi	5
1.4. Sistematika Penyajian	5
1.5. Konsep dan Definisi	6
<b>2. KEPENDUDUKAN DAN KB</b>	
2.1 Jumlah Penduduk	18
2.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk	20
2.3 Fertilitas dan Keluarga Berencana	23
<b>3. KESEHATAN</b>	
3.1 Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan	34
3.2 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	36
3.3 Tenaga Penolong Persalinan	39
3.4 Pemberian Air Susu Ibu (ASI)	41
<b>4. PENDIDIKAN</b>	
4.1 Melek Huruf dan Tingkat Pendidikan	46
4.2 Tingkat Partisipasi Sekolah	50
4.3 Angka Putus Sekolah	53
<b>5. KETENAGAKERJAAN</b>	
5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Kesempatan Kerja	60
5.2 Lapangan Pekerjaan	65

<b>6. PENGELUARAN RUMAH TANGGA DAN KEMISKINAN</b>	
6.1 Pengeluaran Rumah Tangga	69
6.2 Penduduk Miskin	75
<b>7. PERUMAHAN</b>	
7.1 Fasilitas Rumah Tinggal	82
7.2 Kualitas Rumah Tinggal	89

<https://kutimkab.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017	19
Tabel 2.2.	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> ) menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017	22
Tabel 2.3	Persentase Penduduk 10 Tahun Ketas menurut Status Perkawinan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017	24
Tabel 2.4	Persentase Wanita 10 Tahun Keatas yang Pernah Kawin Menurut Umur Kawin Pertama di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017	25
Tabel 3.1	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2017	35
Tabel 3.2	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2017	37
Tabel 3.3	Persentase Penduduk yang berobat jalan menurut Tempat Berobat di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2017	38

Tabel 3.4	Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang pernah diberi ASI menurut Rata-rata Lama Pemberian ASI di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2017	42
Tabel 4.1	Angka Melek Huruf penduduk 15 tahun Keatas menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2014-2017	47
Tabel 4.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-18 Tahun menurut Usia Sekolah di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2014-2017	51
Tabel 4.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2014-2017	52
Tabel 4.4	Angka Putus Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017	54
Tabel 5.1	Perkembangan persentase penduduk usia kerja di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2015-2017	60
Tabel 5.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2015-2017	62
Tabel 5.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2014-2017	63

Tabel 5.4	Tingkat Kesempatan Kerja menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2014-2017	64
Tabel 5.5	Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2014-2017	66
Tabel 6.1	Pengeluaran Sebulan untuk Makanan menurut Jenis Kelompok Makanan (Rp) di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017	72
Tabel 6.2	Rata-Rata Pengeluaran Bukan Makanan per Kapita Sebulan Menurut Jenis Kelompok Bukan Makanan (Rp) di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017	74
Tabel 6.3	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2013-2017	76
Tabel 6.4	Nilai Batas Garis Kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017	76
Tabel 7.1	Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2015-2017	84
Tabel 7.2	Persentase Rumah tangga menurut Sumber Air Minum Utama di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2015-2017	85

Tabel 7.3	Persentase Rumah Tangga menurut Kualitas Perumahan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2017	91
-----------	--	----

<https://kutimkab.bps.go.id>

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	Persentase Persebaran Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017	21
Grafik 2.2.	Persentase Wanita Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun Menurut Jumlah Anak yang Lahir Hidup (ALH) dan Jumlah Anak Yang Masih Hidup (AMH) di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017	26
Grafik 2.3	Persentase Wanita 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin Menurut Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017	27
Grafik 2.4.	Persentase Wanita 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin menurut Cara KB yang Dipakai, Tahun 2017	28
Grafik 3.1	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Penolong Kelahiran di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2017	40
Grafik 4.1	Persentase penduduk 15 Tahun Keatas yang Buta Huruf di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2014-2017	48
Grafik 4.2	Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017	49

Grafik 7.1	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Layak dan Air Minum Tidak Layak di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017	86
Grafik 7.2	Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Pembuangan Limbah Terdekat di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2015-2017 (meter)	88

<https://kutimkab.bps.go.id>

# PENDAHULUAN



KESEHATAN



PENDIDIKAN



KEPENDUDUKAN  
DAN KB

INDIKATOR  
KESEJAHTERAAN  
RAKYAT  
KABUPATEN  
KUTAI TIMUR  
TAHUN 2017



KETENAGAKERJAAN



PERUMAHAN



PENGELUARAN  
RUMAH TANGGA  
DAN KEMISKINAN



# BAB 1 PENDAHULUAN



## 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat yang termuat dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berbagai program pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah Kutai Timur adalah untuk mensejahterakan rakyatnya.

Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tekad dari pemerintah daerah Kutai Timur. Pembangunan yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan, lingkungan hidup, keamanan, politik dan bidang lainnya merupakan bidang-bidang pembangunan yang harus dinikmati oleh semua masyarakat Kutai Timur tanpa membedakan suku, agama, partai politik dan sebagainya.

Untuk dapat melihat sampai sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, monitoring terhadap hasil-hasil pembangunan mutlak

## *Pendahuluan*

diperlukan sehingga program pembangunan berikutnya dapat lebih dioptimalkan.

Dalam memonitor pencapaian tingkat kesejahteraan rakyat di Kutai Timur, diperlukan indikator-indikator yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi kesejahteraan penduduk Kabupaten Kutai Timur. Disadari bahwa dimensi kesejahteraan rakyat sangat luas dan kompleks, sehingga suatu taraf kesejahteraan hanya dapat terlihat (*visible*) melalui aspek tertentu. Oleh karena itu dalam publikasi ini kesejahteraan rakyat diamati dari berbagai aspek yang spesifik, yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi rumah tangga dan kemiskinan, serta perumahan.

Setiap aspek disajikan secara terpisah dalam bab tersendiri. Selain itu, tidak semua permasalahan kesejahteraan rakyat dapat diamati dan diukur. Publikasi ini hanya menyajikan kondisi kesejahteraan rakyat yang dapat diamati dan terukur (*measurable welfare*) baik dengan menggunakan indikator tunggal maupun indikator komposit.

### **1.2. Tujuan**

Tujuan secara umum pembuatan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Timur 2017 dimaksudkan untuk memberikan gambaran perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Kutai Timur.

Sedangkan tujuan secara khusus untuk mengetahui tingkat perkembangan dan persebaran penduduk Kutai Timur, memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk di bidang pendidikan,

kesehatan, ketenagakerjaan, pengeluaran rumahtangga dan kemiskinan serta perumahan.

Dengan tersedianya publikasi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kebijakan pembangunan terkait kesejahteraan rakyat Kutai Timur.

### **1.3 Metodologi**

Dalam menyusun publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kutai Timur 2017 ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil beberapa survei yang telah dilaksanakan BPS seperti Susenas dan Sakernas serta data sekunder yang bersumber dari beberapa instansi terkait.

Adapun metodologi yang diterapkan dalam menyajikan publikasi ini adalah dengan metode deskriptif. Melalui metode ini, potret kesejahteraan rakyat Kutai Timur 2017 akan dianalisis sesuai dengan tabel-tabel yang tersedia.

### **1.4 Sistematika penyajian**

Secara sistematis publikasi ini disajikan dalam tujuh bagian. Masing-masing bagian disajikan uraian secara rinci sesuai dengan tema besar bahasan dalam buku ini. Pada bagian pertama (Bab I) disajikan fenomena yang melatarbelakangi penyusunan buku ini, tujuan, metodologi dan sistematika penyajian serta konsep yang digunakan. Bab II disajikan mengenai kondisi kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Kutai Timur mencakup jumlah, persebaran dan kepadatan penduduk, serta Keluarga Berencana. Bagian selanjutnya (Bab III) menyajikan kondisi kesehatan mencakup

## *Pendahuluan*

derajat dan status kesehatan penduduk, tenaga penolong persalinan, pemberian ASI bagi Balita dan pemanfaatan fasilitas kesehatan.

Gambaran mengenai kondisi pembangunan dalam bidang pendidikan disajikan pada Bab IV yang meliputi angka partisipasi yang mencakup partisipasi sekolah, partisipasi kasar dan partisipasi murni, putus sekolah, angka melek huruf dan pendidikan yang ditamatkan. Pada Bab V disajikan data ketenagakerjaan yang berisi tentang tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kesempatan kerja, lapangan pekerjaan. Bab VI perumahan dan lingkungan yang dibahas tentang fasilitas dan kualitas rumah tinggal.

### **1.5 Konsep dan Definisi**

- a. **Tipe Daerah** menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian dan akses ke fasilitas perkotaan.
- b. **Rumah Tangga Biasa** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Rumah Tangga Khusus adalah orang yang tinggal di asrama seperti asrama perawat, asrama mahasiswa dan asrama TNI/Polisi, panti asuhan, panti jompo dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) berjumlah 10 orang atau lebih.

- c. **Kepala Rumah Tangga** adalah salah seorang dari ART yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.
- d. **Anggota Rumah Tangga** adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah. Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih).  
Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.
- e. **Kawin** adalah mempunyai isteri (bagi pria) atau suami (bagi wanita) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun tinggal terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri.

## *Pendahuluan*

- f. **Cerai Hidup** adalah berpisah sebagai suami-isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi mengaku pernah hamil dianggap sebagai cerai hidup.
- g. **Cerai Mati** adalah ditinggal mati oleh suami atau isterinya dan belum kawin lagi.
- h. **Anak Lahir Hidup:** Anak Lahir Hidup adalah semua anak yang waktu lahir memperlihatkan tanda-tanda kehidupan, walaupun sesaat, seperti adanya detak jantung, bernafas, menangis dan tanda-tanda kehidupan lainnya.
- i. **Anak Masih Hidup** adalah anak masih hidup adalah semua anak yang dilahirkan hidup yang pada saat pencacahan masih hidup, baik tinggal bersama orang tuanya maupun yang tinggal terpisah.
- j. **Pendidikan:**

Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SM/MA/ sederajat dan PT.

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan

berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau pra-sekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

- k. **Tidak/Belum Pernah Sekolah** adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke sekolah dasar.
- l. **Tamat Sekolah** adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.
- m. **Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang sudah ditamatkan oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki dan ditamatkan oleh seseorang yang masih bersekolah.

Belum tamat SD adalah pernah/sedang bersekolah di SD atau yang sederajat tetapi tidak/belum tamat.

SD meliputi sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah dan sederajat.

## Pendahuluan

SMP meliputi jenjang pendidikan SMP umum, madrasah tsanawiyah,

SMP kejuruan dan sederajat.

SM meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat.

Diploma/Sarjana adalah program DI/DII/DIII atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda, program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu perguruan tinggi, program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), spesialis 1 atau 2 pada suatu perguruan tinggi.

- n. **Dapat Membaca dan Menulis** adalah kemampuan seseorang untuk bisa membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf tertentu.
- o. **Angka Buta Huruf** adalah proporsi penduduk usia tertentu yang tidak dapat membaca dan atau menulis huruf Latin atau huruf lainnya terhadap penduduk usia tertentu.
- p. **Angka Partisipasi;**

- (1) Angka Partisipasi Sekolah (APS): proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

$$APS_{7-12} = \frac{P_{7-12} \text{ Masih Sekolah}}{P_{7-12}} \times 100\%$$

$P_{7-12}$  = Penduduk Usia 7-12 tahun

- (2) Angka Partisipasi Murni (APM) : Proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya.

$$APM_{7-12} = \frac{P_{7-12}^{SD}}{P_{7-12}} \times 100\%$$

- (3) Angka Partisipasi Kasar (APK) : Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

$$APK_{SD} = \frac{P_{SD}}{P_{7-12}} \times 100\%$$

- q. **Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.
- r. **Keluhan kesehatan** adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan baik karena penyakit, kecelakaan, kriminal dll.
- s. **Sakit** adalah menderita penyakit baik akut maupun kronis atau gangguan kesehatan lainnya yang menyebabkan aktivitas kerja terganggu. Orang yang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya masuk angin atau pilek) tetapi kegiatan sehari-harinya tidak terganggu dianggap tidak sakit.
- t. **Penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan** adalah penolong kelahiran terakhir oleh dokter, bidan, dan tenaga medis.
- u. **ASI (Air Susu Ibu)** adalah satu-satunya makanan terbaik bagi bayi dan juga makanan alami, yang komposisinya memenuhi seluruh kebutuhan bayi selama enam bulan. ASI

## *Pendahuluan*

mengandung zat kekebalan yang memberi perlindungan terhadap berbagai penyakit dan juga mengandung enzim yang akan membantu pencernaan. Menyusui dengan rasa kasih sayang dapat mempererat ikatan batin ibu dan bayi.

- v. **Mengobati sendiri** adalah upaya art yang melakukan pengobatan dengan menentukan jenis obat sendiri (tanpa saran/resep dari tenaga kesehatan/batra).
- w. **Angkatan Kerja** adalah penduduk yang selama seminggu sebelum pencacahan mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja, atau yang sedang menganggur.

**Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu sebelum pencacahan. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah, yang membantu dalam kegiatan usaha/ekonomi).

**Menganggur** adalah mereka yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan. Mereka yang dikategorikan sebagai penganggur adalah mereka yang sedang:

- (1) Mencari pekerjaan;
- (2) Mempersiapkan suatu usaha;
- (3) Sudah diterima bekerja namun belum memulainya, dan
- (4) Mereka yang tidak mencari pekerjaan akibat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan.

**Mencari Pekerjaan** adalah kegiatan dari mereka yang bekerja tetapi karena suatu hal masih mencari pekerjaan; atau mereka yang dibebastugaskan dan akan dipanggil kembali tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

**Mempersiapkan suatu usaha** adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila seseorang telah/sedang melakukan tindakan nyata seperti mengumpulkan modal atau alat, mencari lokasi, mengurus surat izin usaha, dsb. **Lapangan Usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja.

**Status Pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dibantu buruh tetap atau buruh/karyawan.

**Jam Kerja** adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.

- x. **Bukan Angkatan Kerja** adalah penduduk yang selama seminggu sebelum pencacahan hanya bersekolah, mengurus rumah tangga,

## *Pendahuluan*

atau melakukan kegiatan lainnya. Dapat juga berarti tidak melakukan kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.

- y. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

TPAK dihitung dengan rumus:

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas.

- z. **Tingkat Pengangguran Terbuka** adalah persentase angkatan kerja yang menganggur dan tidak sedang mempunyai pekerjaan.

TPT dihitung dengan rumus:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Orang yang Menganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

# KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (KB)

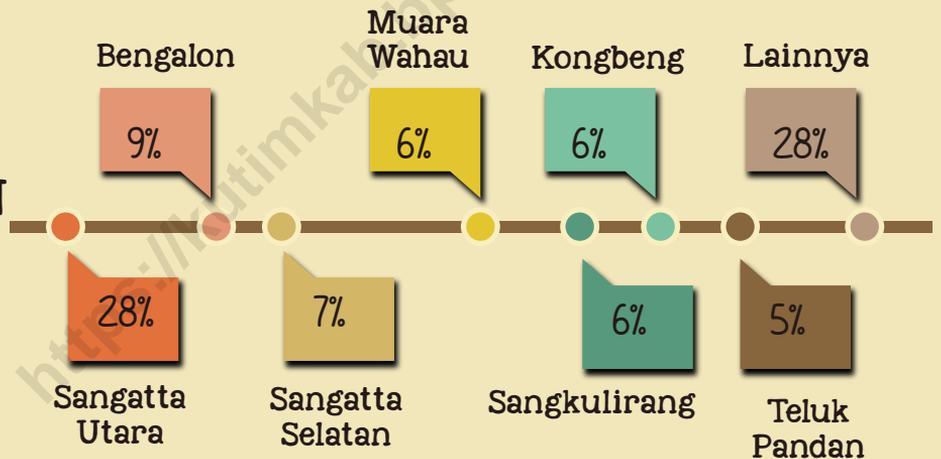
# 2



Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017

## 347.468 Jiwa

### PERSEBARAN PENDUDUK



### KELUARGA BERENCANA (KB)

Sedang Memakai KB

**55,51%**

Pernak Memakai KB

**14,16%**

Tidak Memakai KB

**31,34%**

Sebagian besar Wanita Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin Sedang Memakai Alat Kontrasepsi



## BAB 2 KEPENDUDUKAN & KB



Kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Kependudukan atau dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang akan dilakukan. Penduduk dapat berperan sebagai subyek pembangunan, dimana penduduk menjadi penggerak kegiatan pembangunan, tidak hanya menikmati hasil tetapi juga berperan aktif dalam proses pembangunan. Di sisi lain, penduduk sebagai obyek pembangunan, yakni pembangunan yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk kemakmuran masyarakat dan hasilnya dapat dinikmati untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan yang dilakukan harus mempertimbangkan aspek kependudukan, terutama kapasitas penduduk suatu wilayah.

Keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar namun diikuti dengan tingkat kualitas penduduk yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan dan akan menghambat jalannya proses pembangunan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan agar potensi penduduk dapat berperan aktif dalam proses pembangunan suatu wilayah adalah dengan pembangunan berwawasan kependudukan. Pembangunan

berwawasan kependudukan menekankan pada pembangunan lokal, perencanaan berasal dari bawah, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Karena masalah kependudukan memiliki posisi yang penting bagi pembangunan daerah, maka data kependudukan sangat diperlukan dalam penentuan kebijakan maupun perencanaan program terkait. Data kependudukan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang lalu dan yang sedang berjalan, bahkan dapat memperkirakan program kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

Pada tingkat nasional, terdapat isu kependudukan terkait bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia selama periode 2020-2030. Oleh karena itu, di bidang kependudukan, perlu disusun rencana strategis pemerintah dalam menghadapi *the windows of opportunity*. Bonus demografi didefinisikan sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan menurunnya Rasio Ketergantungan sebagai hasil penurunan fertilitas jangka panjang (Wongboonsin *et. al.* 2003). Pada periode dengan bonus demografi, belanja publik yang semula diperuntukkan bagi program-program sosial dapat dialihkan untuk investasi pada sektor produktif maupun infrastruktur.

### **2.1 Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk di suatu daerah selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Penduduk Kutai Timur menurut perkembangannya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, tahun 2017 jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur sekitar 347.468 jiwa. Mayoritas penduduk berada di

## Kependudukan

Kecamatan Sangatta Utara sebagai ibukota Kabupaten Kutai Timur sebanyak 98.325 jiwa, diikuti Kecamatan Bengalon sebanyak 31.006 jiwa dan Kecamatan Sangatta Selatan sebesar 24.761 jiwa.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017**

Kecamatan	Jumlah Penduduk
(1)	(2)
Muara Ancalong	16 953
Busang	5 851
Long Mesangat	5 748
Muara Wahau	21 327
Telen	7 817
Kongbeng	21 190
Muara Bengkal	15 347
Batu Ampar	5 682
Sangatta Utara	98 325
Bengalon	31 006
Teluk Pandan	16 639
Sangatta Selatan	24 761
Rantau Pulung	9 752
Sangkulirang	21 953
Kaliorang	10 847
Sandaran	8 803
Kaubun	13 109
Karangan	12 358
<b>Kutai Timur</b>	<b>347 468</b>

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur , Proyeksi Penduduk 2010-2035

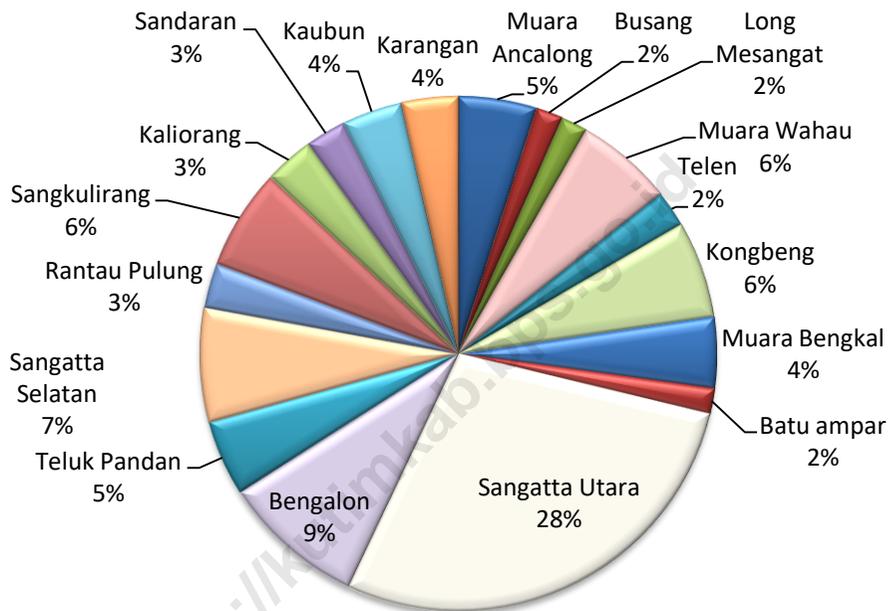
## **2.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk**

Persebaran penduduk adalah distribusi penduduk menurut wilayah. Adapun kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah, yang memperlihatkan rata-rata jumlah penduduk setiap kilometer persegi. Persebaran penduduk yang tidak merata perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan daya dukung terhadap lingkungan. Persebaran penduduk di Kutai Timur secara geografis dapat dikatakan belum merata sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar daerah yang cukup besar.

Kecenderungan penduduk tinggal pada daerah pusat pemerintahan dan perdagangan menyebabkan terjadinya pengelompokan pada daerah ibukota. Sebagian besar penduduk lainnya akan berpindah pada daerah sekitar daerah ibukota. Dalam hal ini Kecamatan Sangatta Utara sebagai ibukota kabupaten menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan, sedangkan Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Sangatta Selatan mengalami penambahan penduduk sebagai dampak dari daerah sekitar pusat ibukota kabupaten.

Berdasarkan Grafik 2.1 dibawah, pada tahun 2017 di Kutai Timur persebaran penduduknya yang terbanyak di Kecamatan Sangatta Utara, yaitu sekitar 28,30 persen dari seluruh total penduduk. Selanjutnya adalah di Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Sangatta Selatan masing-masing sebesar 8,92 persen dan 7,13 persen. Di wilayah lain persebarannya di bawah 7 persen. Wilayah yang persebaran penduduknya paling kecil adalah Kecamatan Batu Ampar sebesar 1,64 persen.

**Grafik 2.1**  
**Persentase Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017**



Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur , Proyeksi Penduduk 2010-2035

Pada Tabel 2.2 terlihat bahwa jumlah penduduk yang tinggal di Kecamatan yang jauh dari ibukota memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit. Namun bila dilihat dari luas wilayah, Kabupaten Kutai Timur memiliki persebaran luas wilayah yang berbeda antar kecamatan. Hal ini berdampak pada keberagaman kepadatan penduduk antar kecamatan. Secara umum, pada tahun 2017 kepadatan penduduk di Kutai Timur sebesar 10 jiwa per km<sup>2</sup>, yang dapat diartikan bahwa setiap 1 km<sup>2</sup> wilayah dihuni oleh 10 jiwa. Kepadatan penduduk yang tertinggi berada di

Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Rantau Pulung, yang mencapai 78 dan 68 jiwa setiap km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk yang terendah, pada kisaran di bawah 10 jiwa setiap km<sup>2</sup> adalah di wilayah Kecamatan Muara Ancalong, Busang, Muara Wahau, Telen, Sangkulirang, Sandaran, dan Karangan. Pola persebaran dan kepadatan penduduk yang demikian kurang menguntungkan bagi pengembangan daerah sehingga menciptakan disparitas yang tajam antara wilayah Kecamatan.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km<sup>2</sup>)**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur , Tahun 2017**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)
Muara Ancalong	16 953	2 739,30	6
Busang	5 851	3 721,61	2
Long Mesangat	5 748	526,98	11
Muara Wahau	21 327	5 724,32	4
Telen	7 817	3 129,61	2
Kongbeng	21 190	581,27	36
Muara Bengkal	15 347	1 522,80	10
Batu Ampar	5 682	204,50	28
Sangatta Utara	98 325	1 262,59	78
Bengalon	31 006	3 196,24	10
Teluk Pandan	16 639	831,00	20
Sangatta Selatan	24 761	1 660,85	15
Rantau Pulung	9 752	143,82	68
Sangkulirang	21 953	3 322,80	7
Kaliorang	10 847	438,91	25
Sandaran	8 803	3 419,30	3
Kaubun	13 109	257,45	51
Karangan	12 358	3 064,36	4
<b>Kutai Timur</b>	<b>347 468</b>	<b>35 747,71</b>	<b>10</b>

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur , Proyeksi Penduduk 2010-2035

### 2.3 Fertilitas dan Keluarga Berencana

Komposisi penduduk menurut status perkawinan dapat menunjukkan kondisi fertilitas suatu wilayah. Status perkawinan dibagi menjadi empat, yaitu belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Semakin besar jumlah penduduk yang berstatus kawin, semakin besar pula peluang tingkat kelahiran di wilayah tersebut.

Dari Tabel 2.3 dapat dilihat penduduk usia 10 tahun ke atas menurut status perkawinan dan jenis kelamin tahun 2017. Secara umum penduduk Kutai Timur berstatus kawin mempunyai proporsi terbesar yaitu 65,33 persen, kemudian disusul penduduk berstatus belum kawin sebesar 31,64 persen. Sedangkan penduduk berstatus cerai hidup 1,73 persen dan cerai mati sebesar 1,30 persen.

**Tabel 2.3**  
**Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas menurut**  
**Status Perkawinan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017**

Status Perkawinan	Penduduk (%)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin	40,66	20,87	31,64
Kawin	57,33	74,88	65,33
Cerai Hidup	1,69	1,77	1,73
Cerai Mati	0,32	2,47	1,30
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Penduduk laki-laki yang berstatus belum kawin (40,66 persen) lebih besar dibanding penduduk perempuan (20,87 persen). Sebaliknya, penduduk perempuan yang berstatus kawin (74,88 persen) lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki (57,33 persen). Kondisi yang sama juga terlihat untuk penduduk perempuan (2,47 persen) yang berstatus cerai mati persentasenya lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki (0,32 persen). Begitu juga proporsi penduduk perempuan berstatus cerai hidup sebesar 1,77 persen lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki sebesar 1,69 persen.

Penundaan usia perkawinan pertama dan program keluarga berencana (KB) pada wanita merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas. Dengan penundaan usia perkawinan pertama akan berdampak memperpendek masa reproduksi, sedangkan semakin muda seseorang melakukan perkawinan, maka akan semakin panjang masa reproduksinya dan akan memperbesar peluang orang tersebut untuk melahirkan anak lebih banyak. Dengan demikian memungkinkan terjadinya tingkat fertilitas yang lebih tinggi.

Wanita yang kawin pada usia sangat muda cenderung belum memiliki kesiapan yang matang, baik secara mental maupun fisiknya. Risiko yang dihadapi cukup besar pada saat mengandung dan melahirkan, yang akan berpengaruh pada keselamatan ibu dan anak. Salah satu cara yang dapat membantu menunda usia perkawinan pertama bagi wanita adalah memberi kesempatan kepada wanita untuk bersekolah lebih tinggi, karena akan meningkatkan pengetahuan mereka, khususnya tentang risiko kawin muda bagi ibu sehingga menjadikan mereka berani mengambil keputusan untuk tidak melakukan perkawinan pada usia yang terlalu muda.

**Tabel 2.4**  
**Persentase Wanita 10 Tahun Keatas yang Pernah Kawin Menurut Umur Kawin Pertama di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017**

Tahun	Umur Kawin Pertama			Total
	≤ 16	17-18	≥19	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2017	10,33	19,77	69,91`	100,00
2016	12,89	21,46	65,64	100,00

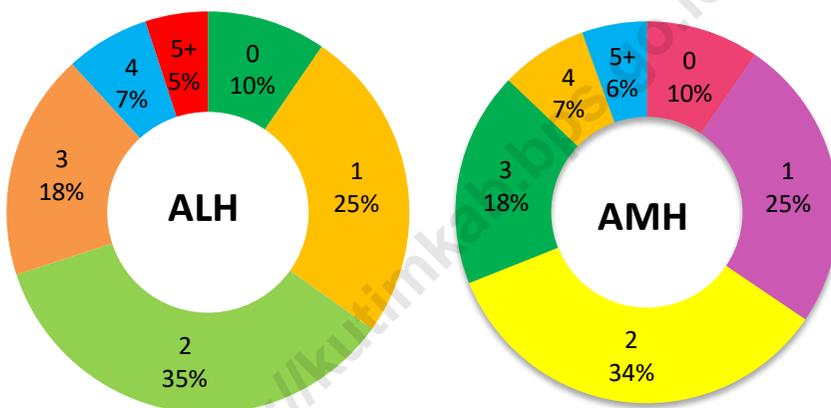
Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Komposisi penduduk wanita usia 10 tahun ke atas di Kutai Timur pada tahun 2017 menunjukkan persentase wanita pada usia perkawinan pertama yang berumur 16 tahun kebawah sebanyak 10,33 persen, mengalami banyak penurunan dibanding tahun 2016 (12,89 persen). Persentase wanita pada usia perkawinan pertama yang berumur 17-18 tahun sebanyak 19,77 persen, lebih menurun dibanding tahun 2016 (21,46 persen). Untuk usia perkawinan pertama yang lebih matang yaitu usia 19 tahun keatas sebanyak 69,91 persen, mengalami peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2016 (65,64 persen). Dari Tabel 2.4 dapat dilihat bahwa mayoritas wanita di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2017 melangsungkan perkawinan pertamanya pada usia matang (19 tahun keatas) sama seperti tahun sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan karena semakin meningkatnya tingkat pendidikan wanita Kabupaten Kutai Timur yang menyebabkan penundaan usia perkawinan. Demikian juga, proporsi wanita kawin pada usia muda (16 tahun kebawah dan usia 17-18 tahun) menjadi menurun dari tahun sebelumnya, yang mengindikasikan kesadaran anak-anak perempuan untuk mengenyam

pendidikan setinggi-tingginya, hal ini bisa dilihat dari nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk perempuan tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 74,75 bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 71,79 untuk anak perempuan usia 16-18 tahun

**Grafik 2.2**

**Persentase Wanita Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun Menurut Jumlah Anak yang Lahir Hidup (ALH) dan Jumlah Anak Yang Masih Hidup (AMH) di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017**



**Rata-rata ALH = 2,13**

**Rata-rata AMH = 2,03**

*Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional*

Indikator rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup (ALH) dari wanita usia 15-49 tahun memperlihatkan kemampuan reproduksi wanita usia 15-49 tahun. ALH juga merupakan salah satu cerminan dari keberhasilan program keluarga berencana (KB). Rata-rata jumlah ALH dari wanita usia 15-49 tahun di Kutai Timur pada tahun 2017 sebesar 2,13 yang artinya bahwa kemampuan reproduksi wanita usia 15-49 tahun rata-rata melahirkan 2-3 anak. Angka ini sedikit naik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2,11 tahun 2016. Demikian halnya dengan rata-rata jumlah anak masih hidup (AMH) dari wanita pernah kawin usia 15-49 tahun di Kabupaten Kutai Timur. Pada tahun 2017, jumlah anak yang

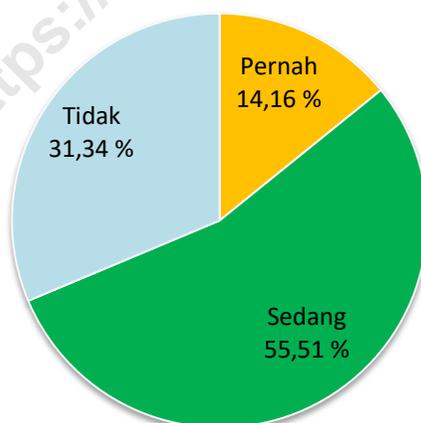
## *Kependudukan*

masih hidup dari wanita pernah kawin usia 15-49 tahun di Kabupaten Kutai Timur rata-rata adalah 2,03 (2-3 anak), sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 2,01 (2-3 anak).

Hanya terdapat sedikit perbedaan antara rata-rata jumlah anak lahir hidup (ALH) dan rata-rata jumlah anak masih hidup (AMH) di Kabupaten Kutai Timur tahun 2017. Kecilnya perbedaan antara rata-rata jumlah anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH) mengindikasikan bahwa tingkat kematian anak relatif kecil.

Pada Grafik 2.3 dibawah ini menjelaskan komposisi wanita usia 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin di Kabupaten Kutai Timur yang sedang dan pernah menggunakan alat/cara KB.

**Grafik 2.3**  
**Persentase Wanita 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin Menurut Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017**



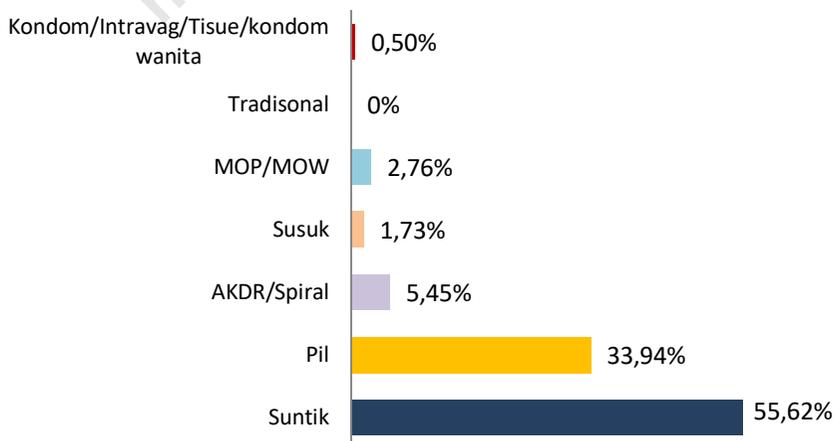
*Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional*

Pada tahun 2017 sekitar 14,16 persen wanita berumur 15-49 tahun dan berstatus pernah kawin menyatakan pernah menggunakan alat/cara KB, angka ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan

tahun sebelumnya sebesar 11,84 persen tahun 2016. Sementara yang menyatakan sedang menggunakan alat/cara KB sekitar 55,51 persen, yang berarti juga terjadi kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya 52,79 persen tahun 2016.

Menunda/menjarangkan kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi merupakan upaya untuk menurunkan tingkat fertilitas. Pilihan penggunaan alat/cara KB oleh akseptor diantaranya dipengaruhi oleh harga, ketersediaan dan kemudahan untuk mengakses alat/cara tersebut, dan sebagainya. Jika terjadi kenaikan harga alat kontrasepsi yang tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dikhawatirkan pemakaian alat kontrasepsi akan mengalami penurunan. Begitu juga dengan ketersediaan dan kemudahan akses untuk mendapatkan alat kontrasepsi dapat mempengaruhi pilihan penggunaan alat kontrasepsi.

**Grafik 2.4**  
**Persentase Wanita 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin menurut Cara KB yang Dipakai, Tahun 2017**



Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

## *Kependudukan*

Alat kontrasepsi Jika tersedia dan mudah diperoleh, ada kecenderungan alat kontrasepsi tersebut akan digunakan. Suntik merupakan alat KB yang banyak dipilih wanita pernah kawin di Kabupaten Kutai Timur. Pada tahun 2017, suntik digunakan oleh sekitar 55,62 persen akseptor KB. Angka ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2016 (53,42 persen). Sebaliknya, penggunaan alat KB Susuk menurun tahun 2017 sebesar 1,73 persen dibandingkan tahun 2016 sebesar 2,21 persen. Tingginya prevalensi pemakaian alat KB Suntik ini diduga akibat biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat/cara KB ini relatif lebih terjangkau dan lebih mudah didapatkan. Selanjutnya, pada tahun 2017 adanya penurunan penggunaan KB Spiral dan Tradisional/Pantang berkala masing-masing adalah 5,45 persen dan 0 persen dibandingkan tahun 2016 sebesar 7,63 persen (KB Spiral) dan 1,18 persen (KB Pantang Berkala). Penggunaan KB tahun 2017 mengalami peningkatan pada penggunaan MOW (Medis Operasi Wanita) sebesar 2,23 persen, sebaliknya pada penggunaan MOP (Medis Operasi Pria) menurun menjadi 1,37 persen. Sejak tahun 2017, munculnya penggunaan kondom di Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,5 persen. Munculnya prevalensi penggunaan kondom di Kabupaten Kutai Timur mencerminkan adanya kesadaran penduduk terhadap pencegahan fertilitas maupun HIV/AIDS.



# KESEHATAN 3



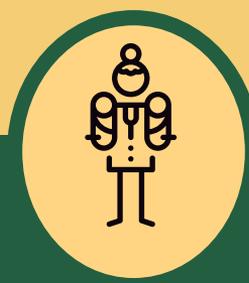
7,87%

Persentase Penduduk yang Mengalami Gangguan Kesehatan Sehingga Mengganggu Aktivitas Seharian-Hari (Angka Kesakitan)



43,44%

Persentase Penduduk yang Mengalami Gangguan Kesehatan dan Berobat Jalan ke Praktek Dokter/ Poliklinik



73,48%

Persentase Terbanyak Penolong Persalinan pada Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun yaitu Bidan



57,14%

Rata-Rata Lama (Bulan) Pemberian ASI Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Pernah diberi ASI adalah Kurang dari 12 Bulan



# BAB 3

## KESEHATAN



Kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Status kesehatan masyarakat suatu daerah dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan daerah tersebut dalam usaha pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya. Apabila pemenuhan kesehatan dapat terwujud maka akan lahir SDM berkualitas yang merupakan modal utama dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan dalam keadaan sehat, maka seseorang dapat berbuat, berkarya, berkreasi, dan melakukan kegiatan produktif lainnya. SDM yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas, baik kuantitas maupun kualitasnya.

Secara langsung ataupun tidak langsung, gangguan kesehatan atau penyakit akan mempengaruhi produktivitas dan perekonomian rumah tangga. Penyebabnya adalah biaya untuk pengobatan, hilangnya waktu kerja atau sekolah, dan hilangnya aset keluarga. Sakit secara langsung meningkatkan pengeluaran rumah tangga, yaitu biaya pengobatan (termasuk transport). Penduduk pada kelompok usia produktif, jika sakit akan mempengaruhi pendapatan yang akan diterimanya, sedangkan pada kelompok anak sekolah akan kehilangan waktu untuk menuntut ilmu. Pada kasus penyakit kronis atau berat, orang akan terpaksa menjual aset keluarga (seperti: tanah, rumah, perhiasan, dan lain-lain) untuk biaya pengobatan.

## *Kesehatan*

Untuk mewujudkan keadaan sehat, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas fisik penduduk yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan bagi seluruh penduduk baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Kesehatan dan gizi merupakan bagian dari indikator kesejahteraan penduduk dalam hal kualitas fisik, dalam hal ini dapat dilihat melalui angka kesakitan dan status gizi. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat melalui penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan.

### **3.1 Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan**

Penduduk yang sehat cenderung memiliki kualitas fisik yang baik. Dengan fisik yang baik segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari akan berjalan dengan lancar baik bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga, maupun melakukan aktivitas lainnya. Hal ini dikarenakan bila tingkat kesehatan penduduk pada level yang relatif tinggi maka akan memungkinkan mereka mampu mencurahkan seluruh ketrampilan, keahlian, dan kreatifitas selama jam-jam kegiatan mereka. Sebaliknya, jika tingkat kesehatan penduduk berada pada kondisi yang kurang baik maka mereka cenderung kurang berperan serta dalam menciptakan tingkat efisiensi pekerjaan yang tinggi. Salah satu indikator yang menggambarkan status kesehatan penduduk adalah angka keluhan kesehatan dan angka kesakitan.

Angka keluhan kesehatan diukur dengan menggunakan pendekatan penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan yang lalu, sedangkan angka kesakitan yaitu persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan hingga mengganggu aktivitasnya sehari-hari.

Tabel 3.1 memperlihatkan perkembangan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan referensi. Penduduk yang pernah mempunyai keluhan kesehatan mengalami penurunan dari 20,87 persen pada tahun 2016 turun menjadi 16,13 persen pada tahun 2017. Jika dilihat menurut jenis kelamin persentase perempuan yang mengalami keluhan kesehatan lebih sedikit dibanding laki-laki dimana masing-masing sebesar 16,19 persen untuk penduduk perempuan dan 16,17 persen untuk penduduk laki-laki.

**Tabel 3.1**  
**Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2017**

Jenis Kelamin	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Keluhan Kesehatan</b>		
Laki-Laki	20,54	16,17
Perempuan	21,26	16,19
Laki-Laki + Perempuan	20,87	16,13
<b>Angka Kesakitan</b>		
Laki-Laki	10,47	6,82
Perempuan	11,59	9,11
Laki-Laki + Perempuan	10,98	7,87

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

## *Kesehatan*

Selain keluhan kesehatan, pada Grafik 3.1 juga ditampilkan perkembangan angka kesakitan. Angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang mengalami sakit dan menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Angka kesakitan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2016 menurun dari 10,98 persen turun menjadi 7,87 persen tahun 2017. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin angka kesakitan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki masing-masing sebesar 9,11 persen dan 6,82 persen.

### **3.2 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan**

Kepedulian masyarakat terhadap kesehatan dan hidup sehat merupakan gambaran daripada pola pikir masyarakat tersebut, salah satu indikator untuk mengukur kepedulian masyarakat terhadap kesehatan dan hidup sehat adalah akses ke fasilitas pelayanan kesehatan. Di satu sisi, semakin sering masyarakat melakukan konsultasi atau pengobatan/perawatan ke fasilitas kesehatan, mengisyaratkan semakin tinggi kepedulian atau kesadaran masyarakat terhadap masalah kesehatan. Namun di sisi lain, semakin tinggi angka kunjungan ke fasilitas kesehatan mengisyaratkan semakin tinggi juga tingkat keluhan kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

Dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta diharapkan masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat akan dapat diatasi. Sehingga akan tercipta masyarakat yang sehat dan pada gilirannya akan terwujud sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan produktif. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui

pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan harus didukung oleh kondisi sosial dan ekonomi penduduk yang cukup baik, kemudahan akses, serta tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

Dari hasil Susenas dapat disajikan data tentang upaya pengobatan yang dilakukan penduduk yang mengalami gangguan kesehatan, baik dengan cara berobat sendiri maupun berobat jalan. Pada tahun 2017 persentase penduduk yang berobat jalan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016. Penduduk Kutai Timur yang berobat jalan pada tahun 2016 sebesar 56,13 persen turun menjadi 49,97 persen pada tahun 2017 (Tabel 3.2). Sedangkan, penduduk yang berobat sendiri persentasenya meningkat dari tahun 2016 sebesar 49,11 persen naik menjadi 50,03 persen tahun 2017.

**Tabel 3.2**

**Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2017**

Jenis Kelamin	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Penduduk yang Berobat Jalan</b>		
Laki-Laki	57,60	45,31
Perempuan	54,44	55,52
Laki-Laki + Perempuan	56,13	49,97
<b>Penduduk yang Berobat Sendiri</b>		
Laki-Laki + Perempuan	49,11	50,03

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

## Kesehatan

Tempat rujukan penduduk untuk berobat jalan dapat menggambarkan akses penduduk untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan. Penduduk Kabupaten Kutai Timur secara umum lebih banyak memilih berobat ke Puskesmas dan praktek dokter/poliklinik. Persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dan berobat ke Puskesmas mencapai 32,57 persen pada tahun 2017, angka ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (22,27 persen). Fasilitas kesehatan sebagai tempat berobat penduduk selain Puskesmas adalah praktek dokter/poliklinik dan Rumah Sakit. Persentase penduduk yang berobat jalan ke praktek dokter/poliklinik pada tahun 2017 sebesar 43,44 persen, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya (41,08 persen) .

**Tabel 3.3**  
**Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2017**

<b>Fasilitas kesehatan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
(1)	(2)	(3)
Rumah sakit	45,46	27,17
Praktek Dokter/poliklinik	41,08	43,44
Puskesmas	22,77	32,57
UKBM*	0,21	4,06
Tradisional& lainnya	3,11	1,55

\*UKBM terdiri dari poskesdes, posyandu, dan balai pengobatan

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Persentase penduduk yang berobat jalan ke Rumah Sakit cukup mengalami penurunan yang drastis dari 45,46 persen pada

tahun 2016 menjadi 27,17 persen pada tahun 2017. Sedangkan penduduk yang berobat ke UKBM (poskesdes, posyandu dan balai pengobatan) tahun 2017 sebesar 4,06 persen.

Fasilitas kesehatan tradisional merupakan tempat alternatif untuk berobat bagi penduduk yang mengalami gangguan kesehatan. Yang termasuk dalam fasilitas kesehatan tradisional disini adalah praktek pengobatan tradisional, dukun beranak dan tempat pengobatan lainnya. Pada tahun 2017 persentase penduduk yang berobat ke fasilitas kesehatan ini sebesar 1,55 persen, mengalami penurunan dari tahun 2016 (3,11 persen).

### **3.3 Tenaga Penolong Persalinan**

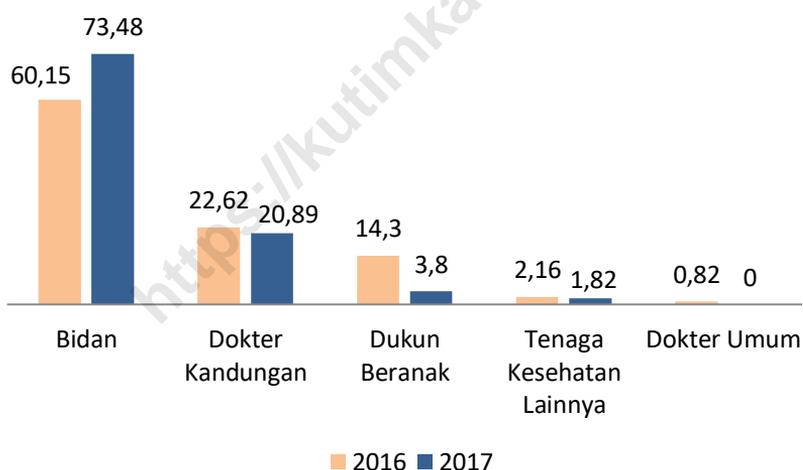
Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, selain ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan, juga yang tidak kalah pentingnya adalah tenaga penolong persalinan. Hal ini berkaitan dengan upaya menurunkan angka kematian bayi dan kematian ibu saat melahirkan. Tenaga penolong persalinan menentukan keberhasilan persalinan dan akan berpengaruh pada kesehatan ibu dan bayi yang ditolong selanjutnya. Data mengenai penolong kelahiran dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesehatan, terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan secara umum.

Persalinan yang aman dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan. Persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dianggap lebih baik daripada yang ditolong oleh dukun atau lainnya, karena dapat menggambarkan tingkat kemajuan

## Kesehatan

pelayanan kesehatan terutama pada saat kelahiran. Walau demikian di Kutai Timur masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun dan tenaga lainnya. Hal ini erat kaitannya dengan kemampuan ekonomi dan faktor budaya yang biasanya terdapat di daerah perdesaan. Selain itu, faktor pendidikan dari masyarakat juga turut mempengaruhi dalam hal pemilihan penolong persalinan.

**Grafik 3.1**  
**Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun**  
**menurut Proses Penolong Kelahiran**  
**di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2017**



*Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2017*

Persentase perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun menurut proses penolong persalinan terakhir di Kabupaten Kutai Timur oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, tenaga kesehatan lainnya) pada tahun 2017 sebesar 96,19 persen. Angka ini lebih tinggi

bila dibanding dengan tahun sebelumnya 85,75 persen, yang berarti terjadi peningkatan balita yang persalinan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan. Khususnya untuk tenaga kesehatan bidan, terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 73,48 persen di tahun 2017, dimana pada tahun 2016 hanya mencapai 60,15 persen. Adapun persentase balita dengan penolong persalinan terakhir oleh dukun dan tenaga lainnya menurun tajam dari 14,3 persen pada tahun 2016 menjadi 3,8 persen pada tahun 2017.

#### **3.4 Pemberian Air Susu Ibu (ASI)**

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal utama dalam pembangunan. Usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia akan lebih baik jika dilakukan sejak dini. Salah satu faktor penting yang memiliki pengaruh dalam upaya tersebut adalah pemberian air susu ibu (ASI). ASI mengandung semua bahan yang diperlukan dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi. Bahkan bahan tersebut bernilai gizi tinggi dan serasi untuk kebutuhan bayi seperti laktosa serta bermacam bahan lemak dan protein. Di dalamnya terdapat pula bermacam bahan lain yang sangat dibutuhkan seperti enzim, komponen bioaktif (Roslina Siregar, dkk 1993., Menyusui dan Kesehatan Anak). Selain itu, ASI juga mengandung zat kekebalan tubuh (penolak/pencegah penyakit) serta dengan memberikan ASI kepada balita akan memberikan kedekatan batin dan menumbuhkan kasih sayang antara ibu dengan anak.

Kesadaran ibu untuk memberikan gizi yang baik pada anaknya secara kuantitatif dapat ditunjukkan oleh angka persentase tertinggi untuk masa menyusui sampai bayi berusia 24 bulan. Di Kabupaten Kutai Timur tahun 2017, persentase balita yang diberi ASI selama 20-23 bulan hanya sebesar 7,84 persen. Sebagian besar Balita di Kabupaten Kutai Timur diberi ASI kurang dari 12 bulan sebesar 57,14 persen. Sebesar 24,80 persen Balita diberi ASI mencapai usia 12-15 bulan, sedangkan 10,22 persen Balita mendapat ASI hingga usia 16-19 bulan.

**Tabel 3.4**  
**Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI menurut Rata-rata Lama Pemberian ASI (bulan) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2017**

<b>Lamanya Disusui (Bulan)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
(1)	(2)	(3)
<12	52,54	57,14
12-15	31,48	24,80
16-19	6,89	10,22
20-23	9,09	7,84
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

## ANGKA MELEK HURUF

Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin/ lainnya.

98,97%

AMH

## ANGKA PARTISIPASI KASAR

APK Jenjang Sekolah Dasar lebih dari 100 menunjukkan ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur atau sebaliknya.

107,32

APK

## ANGKA PARTISIPASI MURNI

APM tertinggi pada Sekolah Dasar menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan.

96,37%

APM

## ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH

APS yang tinggi penduduk usia 7-12 Tahun menunjukan tingginya Jumlah Anak yang sedang bersekolah.

99,17%

APS



4

# PENDIDIKAN



# BAB 4 PENDIDIKAN



Sumber daya manusia (SDM) yang bermoral dan berkualitas sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan suatu bangsa. Pentingnya ketersediaan SDM yang bermoral dan berkualitas menjadikan pendidikan sebagai salah satu bidang pembangunan yang harus diperhatikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang memberi andil yang besar bagi kelanjutan pembangunan di masa datang, karena pendidikan dinilai sebagai pintu masuk untuk memperoleh sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif sebagai pelaksana kegiatan pembangunan.

Maju tidaknya suatu bangsa terletak pada kondisi tingkat pendidikan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin baik kualitas sumber daya manusianya, dan akan semakin majulah bangsa tersebut. Pendidikan merupakan sarana untuk membentuk manusia-manusia yang terampil dan produktif, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan diantaranya mengembangkan akses terhadap pendidikan anak usia dini, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, memperbaiki kurikulum serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik, 20 persen anggaran pendidikan dan bahkan sejak tahun 1994 pemerintah juga melaksanakan program wajib belajar 9 tahun.

## *Pendidikan*

Kondisi pembangunan pendidikan dapat diketahui melalui beberapa indikator pendidikan. Indikator pendidikan dibagi menjadi tiga macam yaitu indikator input, indikator proses, dan indikator output. Indikator input merupakan informasi atau keterangan dasar dan penunjang yang diperlukan dalam perencanaan program pendidikan. Salah satu indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator input adalah rasio murid-guru. Indikator proses merupakan keadaan proses pendidikan atau bagaimana program pendidikan yang diimplementasikan terjadi di masyarakat. Indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator proses antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator output merupakan hasil-hasil yang dicapai oleh masyarakat setelah melalui proses pendidikan. Indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator output antara lain angka melek huruf, angka buta huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan angka putus sekolah.

### **4.1 Melek Huruf dan Tingkat Pendidikan**

Pada tingkat makro, ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah tingkat melek huruf yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis. Dalam hal ini angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. AMH dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis,

menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, dan dengan kemampuan baca tulis seseorang dapat mempelajari dan menyerap ilmu pengetahuan. Hal ini mengandung arti bahwa melek huruf merupakan indikator paling dasar dalam telaah masalah pendidikan di suatu daerah.

**Tabel 4.1**  
**Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun Keatas menurut**  
**Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2014-2017**

Jenis Kelamin	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-Laki	99,00	99,20	98,56	99,48
Perempuan	96,82	98,84	97,89	98,34
Laki-Laki + Perempuan	97,91	99,04	98,26	98,97

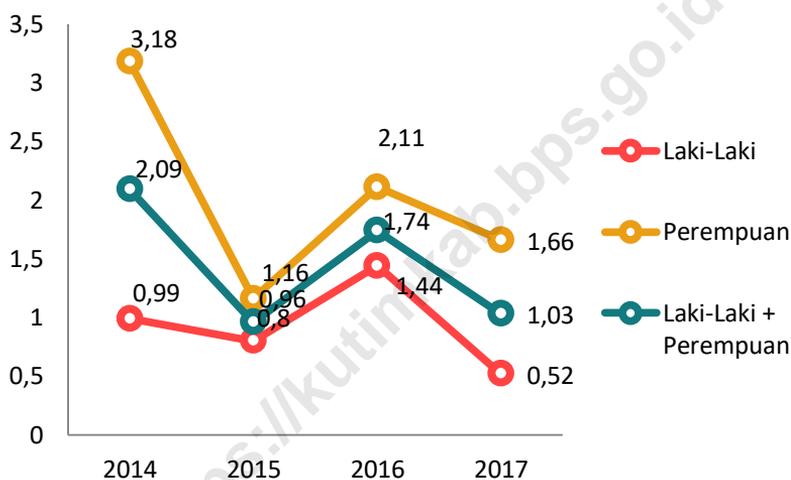
*Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional*

Angka melek huruf di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 98,97 persen. Angka melek huruf bila dilihat menurut jenis kelamin penduduk, angka melek huruf penduduk laki-laki pada tahun 2017 sekitar 99,48 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka melek huruf penduduk perempuan sebesar 98,34 persen.

Angka melek huruf berbanding terbalik dengan angka buta huruf, yaitu persentase penduduk 10 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis baik huruf latin dan atau huruf lainnya,

semakin tinggi angka melek huruf suatu wilayah berarti angka buta hurufnya akan semakin rendah.

**Grafik 4.1**  
**Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Buta Huruf di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2014-2017**

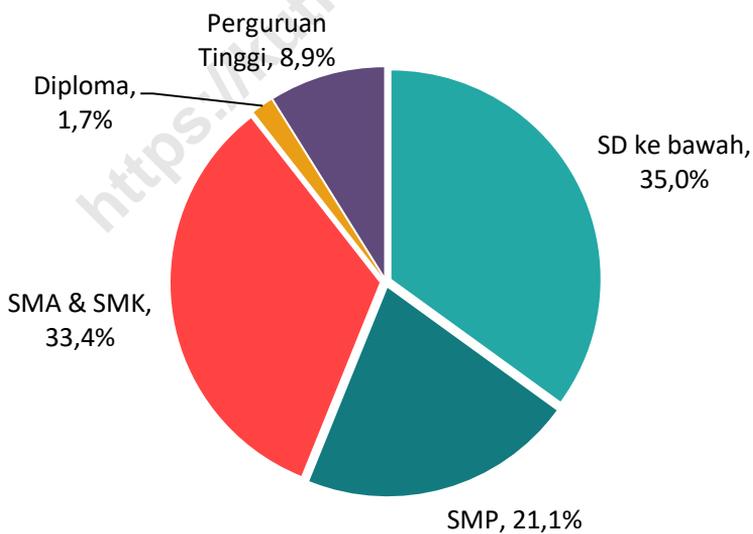


Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Pada tahun 2017 terdapat sekitar 1,03 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf di Kabupaten Kutai Timur. Jika dilihat menurut jenis kelaminnya, persentase penduduk perempuan yang buta huruf lebih besar dibanding penduduk laki-laki. Pada tahun 2017 penduduk perempuan buta huruf sebesar 1,66 persen sedangkan penduduk laki-laki sebesar 0,52 persen.

Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah persentase jumlah penduduk, baik yang tidak/belum sekolah, masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut ijazah/STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) yang dimiliki. Dengan diketahuinya jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan dapat menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

**Grafik 4.2**  
**Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017**



Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Angkatan Kerja Nasional

## *Pendidikan*

Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas pendidikan, karena kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat memberi gambaran tentang jenjang pendidikan tertinggi yang dapat ditamatkan dan keadaan kualitas manusianya. Tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2017, sebagian besar tamat SD ke bawah sebesar 35,0 persen dan tamat SMA & SMK sebesar 33,4 persen. Secara rinci proporsi penduduk umur 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat pada Grafik 4.2.

### **4.2 Tingkat Partisipasi Sekolah**

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang dikenal dengan angka partisipasi sekolah (APS). APS memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak pada kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti.

Pemerintah berupaya untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan yang bertujuan meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan, sehingga akan semakin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Pembangunan sarana prasarana pendidikan yang menjangkau sampai ke pelosok daerah, serta adanya program wajib belajar telah mendorong peningkatan partisipasi sekolah penduduk.

APS penduduk di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2017 mengalami penurunan untuk APS penduduk usia 7-12 tahun dari 99,60 persen pada tahun 2016 menjadi 99,17 persen pada tahun 2017. APS pada kelompok umur 13-15 tahun meningkat dari 95,67 persen pada tahun 2016 menjadi 97,36 persen pada tahun 2017. Sedangkan APS umur 16-18 tahun dari 71,79 persen pada tahun 2016 meningkat signifikan menjadi 81,77 persen pada tahun 2017.

**Tabel 4.2**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-18 Tahun menurut Usia Sekolah di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2014-2017**

Usia Sekolah	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7-12	99,71	99,47	99,60	99,17
13-15	96,03	96,75	95,67	97,36
16-18	85,96	80,45	71,79	81,77

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

APK (Angka Partisipasi Kasar) memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu di wilayah tertentu. Angka Partisipasi Kasar (APK) diperoleh dengan membagi jumlah murid terdaftar di tingkat pendidikan tertentu tanpa memperhitungkan usia pendidikan dengan jumlah penduduk pada kelompok usia yang sesuai dengan tingkat pendidikan. Oleh karena itu, perlu hati-hati dalam menafsirkan APK, karena APK mengandung keluar masuknya anak-anak di atas atau di bawah usia sekolah yang bersangkutan sehingga angkanya bisa melebihi 100 persen.

**Tabel 4.3**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)**  
**menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur,**  
**Tahun 2014-2017**

Uraian	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>APK</b>				
• SD	109,27	115,57	103,20	107,32
• SLTP	102,14	101,79	105,33	96,19
• SLTA	86,67	88,97	68,33	98,26
<b>APM</b>				
• SD	97,33	98,87	93,48	96,37
• SLTP	81,90	83,93	78,30	78,46
• SLTA	71,25	71,03	64,81	65,68

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

APK di Kabupaten Kutai Timur tahun 2017 untuk jenjang pendidikan SD sebesar 107,32 persen, APK SLTP sebesar 96,19 persen, dan APK SLTA 98,26 persen. Apabila dilihat dari keseluruhan Kabupaten Kutai Timur, partisipasi penduduk secara umum pada tingkat pendidikan SD di Kabupaten Kutai Timur tahun 2017 telah melebihi angka 100, yang mengindikasikan terdapat penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut berusia melebihi maupun kurang dari usia 7-12 tahun (SD). APK diatas 100 mengindikasikan pula bahwa Kabupaten Kutai Timur mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target sebenarnya.

Berbeda dengan APK, Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk yang

bersekolah pada jenjang pendidikan dan berusia sesuai dengan usia sekolah pada jenjang pendidikannya, dengan kata lain APM mengukur proporsi anak yang sekolah tepat waktu. APM dibagi dalam 3 jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SLTP untuk penduduk usia 13-15 tahun dan SLTA untuk penduduk usia 16-18 tahun. Program pemerintah wajib belajar 9 tahun yang menjadi sasaran program tersebut adalah anak-anak usia 7-12 tahun (SD) dan 13-15 tahun (SLTP). APM di Kabupaten Kutai Timur tahun 2017 untuk jenjang SD adalah 96,37 persen, jenjang SLTP 78,46 persen. Sedangkan APM jenjang SLTA sebesar 65,68 persen.

#### **4.3 Angka Putus Sekolah**

Angka putus sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Penyebab putus sekolah antara lain karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, keadaan geografis yang kurang menguntungkan, atau kondisi ekonomi orang tua yang miskin. Kemiskinan seringkali menjadi alasan bagi siswa sekolah untuk tidak melanjutkan sekolah, karena mereka diharapkan membantu mencari nafkah untuk keluarganya, dan anggapan lebih baik bekerja dengan mendapatkan uang, di samping anggapan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar biaya yang diperlukan, sementara masyarakat miskin dan rumah tangga miskin tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk biaya pendidikan. Hal ini dapat saja merubah corak permasalahan pekerja anak suatu daerah. Angka putus sekolah dapat digunakan

untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur, serta sekaligus gambaran kemampuan ekonomi orangtua.

**Tabel 4.4**  
**Angka Putus Sekolah Menurut Kelompok Umur**  
**di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017**

Kelompok Umur	Angka Putus Sekolah
(1)	(2)
7-12	0,00
13-15	1,23
16-18	18,23
19-24	85,53

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Pada bahasan ini perkiraan jumlah putus sekolah menggunakan pendekatan kelompok umur 7-24 tahun sudah tidak bersekolah lagi termasuk penduduk yang tamat SD, SLTP dan SLTA dan Perguruan Tinggi, tapi tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Karena usia ini merupakan usia yang ideal untuk menyelesaikan pendidikannya.

Pada tahun 2017, Angka Putus Sekolah pada kelompok usia 7-12 tahun sebesar 0 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pada usia 7-12 tahun atau usia pendidikan Sekolah Dasar (SD) sudah tidak ada penduduk yang putus sekolah. Sedangkan Angka Putus Sekolah kelompok umur 13-15 Tahun setara pendidikan SLTP sebesar 1,23

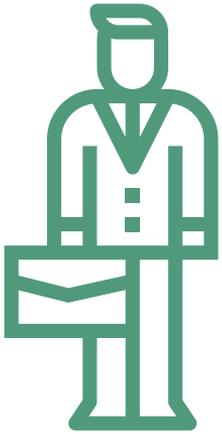
persen. Sedangkan kelompok umur 16-18 tahun setara pendidikan SLTA angka putus sekolah sebesar 18,23 persen. Pada kelompok umur 19-24 tahun setara usia Perguruan Tinggi (Sarjana), angka putus sekolah di Kabupaten Kutai Timur memiliki persentase paling besar yakni sebesar 85,53 persen. Dengan kata lain, Penduduk Kabupaten Kutai Timur pada usia 19-24 tahun hanya sekitar 25 persen yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

<https://kutimkab.bps.go.id>



# KETENAGAKERJAAN

# 5



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Persentase Penduduk Usia Kerja yang Seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan (sedang bekerja maupun sementara tidak bekerja), dan mereka yang sedang mencari pekerjaan.



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah Persentase Penduduk yang tidak memiliki pekerjaan, yang sedang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mampu mendapat pekerjaan atau yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

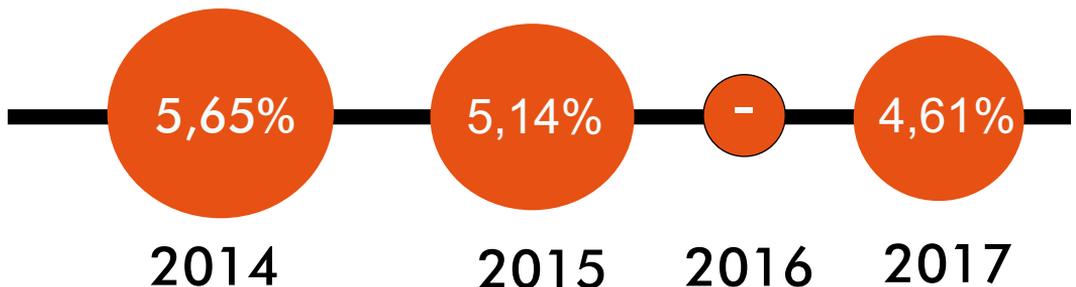


59,89%  
Tahun 2015



66,75%  
Tahun 2017

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



Keterangan : \* Data 2016 Tidak Tersedia



# BAB 5 KETENAGAKERJAAN



Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi sosial ekonomi. Manusia dalam hal ini tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian di berbagai bidang. Karena di dalam proses produksi barang dan jasa, manusia merupakan faktor yang paling penting dibandingkan dengan faktor-faktor produksi yang lain yaitu sebagai tenaga kerja yang dapat menjalankan dan menggunakan faktor produksi lainnya untuk menghasilkan barang dan jasa. Jumlah tenaga kerja yang tepat serta kualitas yang baik dapat meningkatkan jumlah produksi.

Salah satu sasaran dalam pembangunan adalah diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang dan memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Semakin besar kesempatan kerja yang dapat diraih oleh penduduk dalam suatu wilayah, semakin tinggi pula standar hidup penduduk dalam wilayah tersebut. Peningkatan dalam jumlah angkatan kerja, bila tidak diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam pembangunan.

### 5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Kesempatan Kerja

Penduduk terbagi menjadi dua kelompok yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan usia kerja adalah penduduk yang berumur 0-14 tahun. Perkembangan dari Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada Tabel 5.1. Dalam publikasi ini PUK dibagi menjadi tiga kelompok usia yaitu 15-24, 25-54 dan 55+. Kelompok usia 15-24 tahun adalah kelompok usia yang sudah dikategorikan menjadi kelompok usia kerja, meskipun semestinya mereka masih harus sekolah. Kelompok usia 25-54 tahun adalah mereka yang produktif dalam pasar kerja, dan usia 55+ adalah mereka yang dianggap sudah kurang produktif lagi dalam pasar kerja.

**Tabel 5.1**  
**Perkembangan Persentase Penduduk Usia Kerja**  
**di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2015-2017**

Kelompok Umur	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
15-24	25,12	-	22,08
25-54	65,21	-	68,73
55+	9,67	-	11,64

*Keterangan* : \*Data Tidak Tersedia

*Sumber* : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Angkatan Kerja Nasional

Dari Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa persentase penduduk usia kerja menurut kelompok umur di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun 2015 kecuali kelompok umur 15-24 tahun. Penduduk kelompok usia 15-24 tahun di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2017 sebesar 22,08 persen, dan kelompok usia produktif 25-54 tahun sebesar 68,73 persen. Sedangkan untuk usia kurang produktif 55 tahun atau lebih sebesar 11,64 persen.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (usia 15 tahun keatas). Penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun keatas) yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab, seperti sedang cuti, dan mereka yang tidak mempunyai pekerjaan namun sedang berusaha mendapatkan pekerjaan (penganggur). Dari TPAK, kita dapat melihat persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja sehingga berpotensi untuk dapat memproduksi barang dan jasa. Selain itu, keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dapat diukur dengan banyaknya penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja dan penganggur). Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang memasuki pasar kerja atau yang sesungguhnya terlibat secara ekonomi atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu. TPAK Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2017 sebesar 66,75 persen. Dapat dilihat pula bahwa TPAK untuk penduduk laki-laki selalu lebih tinggi dari penduduk

perempuan. TPAK laki-laki sebesar 86,64 persen dan TPAK perempuan sebesar 42,18 persen.

**Tabel 5.2**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2015-2017**

Jenis Kelamin	TPAK		
	2015	2016*	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	82,91	-	86,64
Perempuan	31,40	-	42,18
<b>Total</b>	<b>59,89</b>	<b>-</b>	<b>66,75</b>

*Keterangan* : \*Data tidak tersedia

*Sumber* : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Angkatan Kerja Nasional

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan persentase penduduk yang tidak bekerja (tidak memiliki pekerjaan) tetapi sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (penganggur) terhadap penduduk yang termasuk angkatan kerja. TPT dapat digunakan untuk melihat keterjangkauan pekerjaan (kesempatan kerja). Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja akan tidak mempunyai pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka

maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya contohnya kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka, maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Sangatlah tepat jika pemerintah seringkali menjadikan indikator ini sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan.

**Tabel 5.3**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin**  
**di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2014-2017**

Jenis Kelamin	TPT			
	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	5,87	4,51	-	4,01
Perempuan	4,93	7,22	-	6,11
<b>Total</b>	<b>5,65</b>	<b>5,14</b>	<b>-</b>	<b>4,61</b>

Keterangan : \*Data tidak tersedia

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Angkatan Kerja Nasional

TPT pada tahun 2017 di Kabupaten Kutai Timur sebesar 4,61 persen, atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2015 (5,14 persen). Bila dibedakan menurut jenis kelamin, TPT laki-laki selalu lebih rendah dibanding dengan TPT perempuan. TPT laki-laki tahun 2017 sebesar 4,01 persen dan TPT perempuan sebesar 6,11 persen.

Tingkat kesempatan kerja (TKK) adalah rasio antara penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja. TKK dapat menggambarkan

kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Dari besarnya TKK, kita dapat melihat besarnya peluang seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja untuk bisa terserap dalam pasar kerja atau dapat bekerja. Angkatan kerja yang tidak terserap dalam pasar kerja merupakan masalah, karena mereka akan menganggur.

**Tabel 5.4**  
**Tingkat Kesempatan Kerja menurut Jenis Kelamin**  
**di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2014-2017**

Jenis Kelamin	TKK			
	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	94,13	95,49	-	95,99
Perempuan	95,07	92,78	-	93,89
<b>Total</b>	<b>94,35</b>	<b>94,86</b>	<b>-</b>	<b>95,39</b>

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Angkatan Kerja Nasional

Pertambahan dan pengurangan penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan dipengaruhi oleh dinamika struktur umur, jenis kelamin dan perbedaan struktur ekonomi dan migrasi. Semakin besar angka TKK, semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah. Tingkat kesempatan kerja akan selalu berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka. Jika TPT semakin besar, maka kesempatan kerja akan semakin kecil, dan sebaliknya jika kesempatan kerja besar berarti TPT akan semakin kecil.

TKK pada tahun 2017 di Kabupaten Kutai Timur sebesar 95,39 persen, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2015

(94,86 persen). Bila dibedakan menurut jenis kelamin, TKK laki-laki lebih tinggi dibanding dengan TKK perempuan. TKK laki-laki 95,99 persen dan TKK perempuan 93,89 persen.

## 5.2 Lapangan Pekerjaan

Proporsi pekerja menurut lapangan usaha/pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Lapangan usaha/bidang kerja adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat penduduk bekerja.

**Tabel 5.5**  
**Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut**  
**Lapangan Usaha di Kabupaten Kutai Timur,**  
**Tahun 2014-2017**

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian	49,13	38,88	-	39,56
Pertambangan dan Penggalian	13,89	18,78	-	9,40
Industri	1,91	1,38	-	2,93
Listrik, Gas dan Air	-	0,40	-	0,38
Konstruksi	5,27	5,63	-	2,52
Perdagangan	14,62	15,54	-	18,42
Angkutan dan Komunikasi	1,16	2,09	-	2,81
Keuangan	1,27	1,58	-	3,35
Jasa	12,76	15,71	-	20,61
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Angkatan Kerja Nasional

Banyaknya tenaga kerja yang terserap dalam suatu sektor perekonomian dapat digunakan untuk menggambarkan daya serap sektor perekonomian tersebut terhadap angkatan kerja.

Hingga tahun 2017, sektor pertanian masih tetap merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Kutai Timur. Pada tahun 2017 persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian menunjukkan peningkatan dari tahun 2015.

Pada Tabel 5.5 terlihat bahwa persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian pada tahun 2017 sekitar 39,56 persen. Sektor lain yang juga menyerap banyak tenaga kerja adalah sektor pertambangan dan penggalian, pada tahun 2017 menyerap tenaga sebesar 9,40 persen menurun dari tahun 2015 sebesar 18,78 persen. Sektor jasa juga mempunyai peran yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 20,61 persen.

# PENGELUARAN RUMAH TANGGA DAN KEMISKINAN

# 6

## Persentase Rata-rata Pengeluaran Makanan per Kapita per Bulan (%)

	Padi-padian	2,51%
	Umbi-Umbian	0,96%
	Ikan	13,96%
	Daging	5,33%
	Telur dan Susu	6,81%
	Konsumsi Lainnya	11,11%
	Sayur-Sayuran	10,44%
	Buah-Buahan	4,67%
	Rokok dan Tembakau	14,85%
	Kacang-Kacangan	2,29%
	Makanan Jadi	26,75%

## Persentase Rata-rata Pengeluaran Bukan Makanan per Kapita per Bulan (%)

	60,7%	Perumahan
	18,6%	Aneka Barang dan Jasa
	7,6%	Barang Tahan Lama
	7,3%	Pakaian, Alas Kaki, dan tutup Kepala
	4,2%	Pajak dan Asuransi
	1,6%	Keperluan Pesta dan Upacara

Pada Tahun 2017, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai Timur meningkat sebesar 9,29 Persen

—●— Persentase Penduduk Miskin





# BAB 6

## PENGELUARAN RUMAH TANGGA & KEMISKINAN



Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat melalui besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yang bersangkutan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Mengingat data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, maka dilakukan pendekatan melalui pengeluaran rumah tangga.

Pola pengeluaran dapat mencerminkan tingkat kehidupan masyarakat. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Di negara-negara yang sedang berkembang, pengeluaran untuk keperluan makan masih merupakan bagian terbesar dari keseluruhan pengeluaran rumah tangga. Di negara-negara maju, pengeluaran bukan makanan merupakan bagian yang terbesar dari pengeluaran rumah tangga karena pengeluaran makanan bukan lagi dianggap sebagai kebutuhan yang utama. Pengeluaran primer sudah bergeser kepada pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, rekreasi dan sebagainya.

### 6.1 Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberi gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Terjadinya perubahan pengeluaran atau pergeseran proporsi pengeluaran untuk makanan dapat menunjukkan ada atau tidaknya peningkatan taraf kehidupan rumah tangga. Semakin besar

## Pengeluaran Rumah Tangga & Kemiskinan

konsumsi/pengeluaran rumah tangga terutama porsi pengeluaran untuk bukan makanan, maka tingkat kesejahteraan rumah tangga yang bersangkutan akan semakin baik. Masyarakat yang berpenghasilan rendah cenderung menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk pengeluaran makanan yang merupakan kebutuhan utama yang tidak dapat ditunda dan juga sebaliknya untuk masyarakat yang berpenghasilan tinggi.

**Tabel 6.1**  
**Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Untuk Makanan menurut**  
**Jenis Kelompok Makanan (Rp) di Kabupaten Kutai Timur, Tahun**  
**2017**

<b>Jenis Kelompok Makanan</b>	<b>Pengeluaran (Rupiah)</b>
(1)	(2)
Padi-padian	77.074
Umbi-umbian	6.529
Ikan	94.821
Daging	36.173
Telur dan susu	46.234
Sayur-sayuran	70.916
Kacang-kacangan	15.565
Buah-buahan	31.746
Konsumsi lainnya	77.484
Makanan jadi	181.688
Tembakau dan sirih	100.858
<b>Total Makanan</b>	<b>738.890</b>

*Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional*

Konsumsi makanan dengan gizi yang cukup dan seimbang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kesehatan dan intelegensia manusia. Untuk memenuhi kebutuhan gizi tersebut, setiap orang perlu mengkonsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang serta aman. Dengan mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam setiap hari, kekurangan zat gizi pada jenis makanan yang satu akan dilengkapi oleh keunggulan susunan zat gizi jenis makanan lain, sehingga diperoleh masukan zat gizi yang seimbang. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan berlaku bijak dalam memilih makanan, tidak semata mempertimbangkan status sosial-ekonomi makanan, namun juga harus seimbang dengan manfaat makanan tersebut untuk kesehatan dan tumbuh kembang optimal.

Pada Tabel 6.1 dapat dilihat rata-rata konsumsi makanan per kapita sebulan menurut sub kelompoknya di Kutai Timur tahun 2017. Pada tahun 2017 rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan sebulan sebesar Rp. 738.890,- terbesar pada sub kelompok makanan jadi yaitu sebesar Rp.181.688,-. Sedangkan pengeluaran makanan terkecil adalah sub kelompok umbi-umbian yaitu Rp.6.529,-.

**Tabel 6.2**  
**Rata-rata Pengeluaran Bukan Makanan per Kapita Sebulan menurut**  
**Jenis Kelompok Bukan Makanan (Rp) di Kabupaten Kutai Timur,**  
**Tahun 2017**

<b>Jenis Kelompok Bukan Makanan</b>	<b>Pengeluaran (Rupiah)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
Perumahan	423.586
Aneka barang dan jasa	129.951
Pakaian, alas kaki & tutup kepala	51.142
Barang tahan lama	52.720
Pajak dan asuransi	28.998
Keperluan pesta dan upacara	11.064
<b>Total bukan makanan</b>	<b>697.460</b>

*Sumber ; BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional*

Berdasarkan pengalaman, semakin tinggi tingkat pendapatan, proporsi pengeluaran yang dibelanjakan untuk kebutuhan makanan semakin berkurang, begitu pula sebaliknya. Pola pengeluaran penduduk sebulan untuk bukan makanan ditampilkan pada Tabel 6.2 Nampak bahwa dari tahun ke tahun pengeluaran untuk sub kelompok perumahan mempunyai porsi terbesar bila dibandingkan dengan pengeluaran bukan makanan lainnya. Pengeluaran sub kelompok keperluan pesta dan upacara merupakan pengeluaran dengan porsi paling kecil. Pada tahun 2017 pengeluaran untuk sub kelompok perumahan rata-rata per kapita sebulan sebesar Rp. 423.586,- dan

untuk sub kelompok keperluan pesta dan upacara rata-rata per kapita sebulan sebesar Rp.11.064,-

## **6.2 Penduduk Miskin**

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang umumnya selalu dihadapi oleh sebagian besar penduduk di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan merupakan penyakit sosial dimana individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak sesuai dengan standar tertentu sehingga dikategorikan miskin. Banyaknya kemiskinan secara umum merupakan indikasi lemahnya perekonomian dari suatu wilayah. Oleh karena itu, kemajuan pembangunan ekonomi diantaranya akan tercermin dari keberhasilan program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi atau mengentaskan penduduk dari kemiskinan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan sehingga standar yang digunakan untuk menentukan penduduk sebagai penduduk miskin atau bukan miskin adalah garis kemiskinan.

**Tabel 6.3**  
**Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di**  
**Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2013-2017**

Tahun	Penduduk Miskin	
	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
2013	27 200	9,06
2014	28 300	9,10
2015	29 570	9,31
2016	30 170	9,16
2017	31 950	9,29

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Pada tahun 2017 jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan atau yang lebih dikenal dengan penduduk miskin sebanyak 31.950 jiwa, terjadi peningkatan bila dibanding dengan tahun sebelumnya (30.170 jiwa). Secara persentase penduduk miskin naik dari 9,16 persen pada tahun 2016 menjadi 9,29 persen pada tahun 2017.

**Tabel 6.4**  
**Nilai Batas Garis Kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur,**  
**Tahun 2013-2017**

Tahun	Nilai Batas Garis Kemiskinan (Rp)
(1)	(2)
2013	397 482
2014	408 224
2015	431 328
2016	470 228
2017	512 345

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, 2017

## *Pengeluaran Rumah Tangga & Kemiskinan*

Garis kemiskinan sebagai dasar penghitungan penduduk miskin pada tahun 2017 meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di Kutai Timur garis kemiskinan meningkat dari Rp. 470.228,- pada tahun 2016, menjadi Rp.512.345,- pada tahun 2017.

<https://kutimkab.bps.go.id>



# 7 PERUMAHAN



Kualitas Rumah Tinggal ditentukan oleh kualitas jenis bangunan dan fasilitas



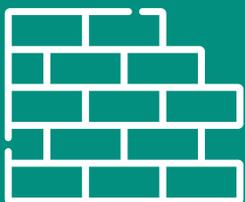
88,13%  
Atap Seng



65,71%  
Lantai Kayu  
/Papan  
Kualitas Tinggi



98,15%  
Listrik  
PLN/non PLN



78,09%  
Dinding Kayu/  
Batang Kayu



91,91%  
Jamban  
Sendiri



67,90%  
Air Kemasan/  
Air Isi Ulang



# BAB 7 PERUMAHAN



Salah satu faktor yang berpengaruh sangat besar terhadap derajat kesehatan manusia adalah keadaan lingkungan. Hal ini dikarenakan manusia dan lingkungan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan sehat akan melahirkan manusia sehat. Begitu juga orang-orang yang sehat akan menghasilkan lingkungan yang sehat pula.

Rumah merupakan lingkungan yang paling dekat dengan manusia. Rumah adalah suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal oleh manusia dalam usaha melangsungkan kehidupannya. Rumah juga merupakan salah satu kebutuhan pokok penduduk selain sandang dan pangan. Rumah berfungsi untuk melindungi fisik dari hujan dan panas dan juga sebagai tempat perlindungan dari serbuan binatang buas dan keganasan alam lainnya. Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, maka fungsi rumah mengalami perkembangan, tidak saja untuk tempat berlindung dari pengaruh kondisi alam, tetapi juga berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan psikologis atau kejiwaan, gaya hidup, status sosial, dan sebagainya. Dilihat dari sudut kejiwaan, rumah merupakan basis terbentuknya kepribadian dan watak manusia. Dalam lingkungan rumah suatu individu mengenal norma-norma tertentu dan adat kebiasaan yang ada dan berlaku dalam suatu masyarakat di

## *Perumahan dan Lingkungan*

sekitarnya. Begitu besar peran dan arti sebuah rumah, membuat semua orang selalu berusaha meningkatkan kualitas rumah dan fasilitas rumahnya agar dapat mendukung segala aktivitasnya.

Secara umum kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Kualitas rumah dapat dilihat dari jenis lantai, luas lantai, jenis atap, dan jenis dinding. Selain kualitas rumah tinggal, tingkat kesejahteraan juga dapat digambarkan dari fasilitas yang terdapat di rumah tersebut. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumahtangga tersebut diantaranya dapat terlihat dari sumber air minum, jarak sumber air minum ke tempat pembuangan limbah terdekat, fasilitas buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya serta mendukung dalam terwujudnya kesehatan anggota rumahtangga.

### **7.1 Fasilitas Rumah Tinggal**

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman tidaknya suatu rumah tinggal yang juga menentukan kualitasnya. Fasilitas rumah tinggal yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah ketersediaan air bersih, jamban sendiri, jamban dengan tangki septik dan penerangan listrik.

Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Kebutuhan manusia akan air sangat kompleks antara lain digunakan untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Di antara kegunaan-kegunaan air tersebut, yang sangat penting adalah kebutuhan untuk minum. Oleh karena itu, untuk keperluan minum, air harus mempunyai persyaratan khusus agar air tersebut tidak menimbulkan penyakit bagi manusia.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk minum dan memasak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih. Jenis sumber air minum merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk, baik dilihat dari segi kesehatan maupun ekonomi. Dalam hal ini penggunaan sumber air minum dapat dijadikan petunjuk adanya perbaikan kesejahteraan penduduk. Berikut ini ulasan singkat, jamban sendiri, jamban dengan tangki septik, penerangan listrik, dan ketersediaan air bersih

Tabel 7.1 menunjukkan bahwa rumahtangga yang mempunyai jamban sendiri di Kabupaten Kutai Timur mencapai 91,91 persen. Sedangkan rumahtangga yang mempunyai jamban dengan pembuangan akhir berupa tangki septik sebanyak 79,71 persen.

Fasilitas penting lainnya adalah penerangan. Akses masyarakat terhadap penerangan dapat meningkatkan produktivitas kerja mereka, disamping juga disadari adanya hubungan timbal balik dimana tingkat kehidupan ekonomi masyarakat juga mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengakses sumber-sumber energi seperti penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik karena cahaya yang dihasilkan lebih terang dibandingkan

dengan sumber penerangan lain. Rumahtangga yang menggunakan penerangan listrik baik itu listrik PLN maupun listrik non PLN di Kabupaten Kutai Timur tahun 2017 telah mencapai 98,15 persen.

**Tabel 7.1**  
**Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2015-2017**

<b>Fasilitas Perumahan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Jamban Sendiri	84,23	80,99	91,91
Jamban dg Tangki Septik	43,11	66,65	79,71
Penerangan Listrik PLN / non PLN	95,35	93,3	98,15

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Pada tahun 2017 rumah tangga di Kabupaten Kutai Timur yang menggunakan air leding mengalami peningkatan menjadi 18,92 persen dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 6,28 persen. Peningkatan penggunaan air leding, sebagai sumber air minum rumah tangga disebabkan karena menurunnya penggunaan air kemasan/air isi ulang sebagai sumber air minum. Hal ini didukung hasil pendataan Susenas bahwa penggunaan air kemasan sebagai sumber air minum mengalami penurunan hingga mencapai 67,9 persen dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 74,95 persen (lihat Tabel 7.2).

**Tabel 7.2**  
**Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Utama di**  
**Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2017**

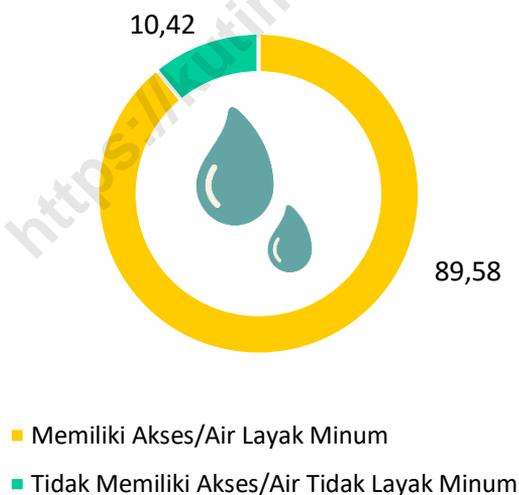
Sumber Air Minum	2016	2017
(1)	(3)	(4)
Leding	6,28	18,92
Air Kemasan/Air Isi Ulang	74,95	67,9
Sumur Bor/Pompa	0,49	1,84
Sumur Terlindung/Sumur Tak Terlindung	9,34	5,57
Mata Air Terlindung/Mata Air Tak Terlindung	0,23	0,8
Air Permukaan/Air Hujan/Lainnya	8,72	4,97
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Sumber air minum lain yang juga digunakan oleh penduduk adalah air minum yang berasal dari sumur bor/pompa. Pada tahun 2017, rumah tangga di Kabupaten Kutai Timur yang menggunakan air sumur bor mencapai 1,84 persen. Namun masih ada penduduk yang menggunakan sumber air minum dari sumur tak terlindung, sumur terlindung, mata air tak terlindung dan terlindung, sungai, air hujan, dan lainnya yaitu sebanyak 11,34 persen. Sumber air minum tak terlindung yang masih dikonsumsi masyarakat dapat menyebabkan masalah kesehatan. Namun kebiasaan masyarakat Kabupaten Kutai Timur merebus air tersebut sebelum diminum dapat mencegah masyarakat dari penyakit.

Air minum layak terdiri dari air yang bersumber dari leding meteran, leding eceran, air terlindung (sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung) dengan jarak  $\geq 10$  meter dari tempat penampungan kotoran/limbah dan air hujan, sedangkan air kemasan terdiri dari air kemasan bermerk dan air isi ulang. Sementara itu untuk air minum tidak layak terdiri dari air yang minum yang bersumber dari sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, air sungai dan air lainnya.

**Grafik 7.1**  
**Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Layak dan Air Minum Tidak Layak di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017**



Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Menurut grafik 7.1, selama tahun 2017 sebanyak 89,58 persen rumah tangga di Kabupaten Kutai Timur telah menggunakan/mempunyai akses air minum layak dan sisanya (10,42

persen) tidak menggunakan/tidak mempunyai akses air minum tidak layak. Dengan kata lain, sebagian besar penduduk Kabupaten Kutai Timur dapat menghindari penyakit yang disebabkan air minum yang dikonsumsi.

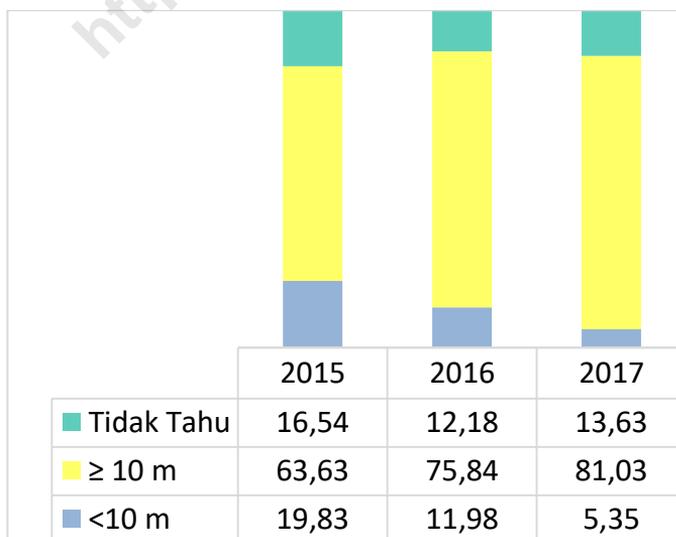
Dengan bertambahnya penduduk yang tidak sebanding dengan area pemukiman, maka masalah pembuangan limbah/kotoran meningkat. Dilihat dari segi kesehatan masyarakat, masalah pembuangan limbah rumah tangga merupakan masalah pokok untuk sedini mungkin diatasi. Karena kotoran manusia adalah sumber penyebaran penyakit yang multikompleks. Penyebaran penyakit yang bersumber dari limbah/kotoran dapat melalui beberapa cara atau jalan antara lain yaitu melalui air, tangan, lalat, dan tanah. Kurangnya perhatian terhadap pengelolaan limbah/kotoran disertai dengan cepatnya pertambahan jumlah penduduk, jelas akan mempercepat penyebaran penyakit.

Tempat pembuangan limbah terdekat sangat berpengaruh terhadap kesehatan anggota rumah tangga dan lingkungannya. Tempat pembuangan yang tidak memenuhi syarat sanitasi akan menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar, misalnya seperti tempat pembuangan berupa lubang tanah atau tanah terbuka dapat mencemarkan sumber air di dekatnya dan dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia juga tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana.

Jarak sumber air minum, seperti sumur dan mata air dengan tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat patut menjadi

perhatian. Jarak sumber air minum, terutama yang berasal dari sumur dan mata air, dengan tempat pembuangan limbah terdekat merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesehatan air minum rumah tangga. Semakin pendek jarak tersebut, maka kemungkinan sumber air minum tersebut tercemar zat-zat ataupun unsur-unsur yang membahayakan kesehatan manusia semakin besar. Jarak yang aman dan ideal untuk tempat pengambilan air minum ke tempat penampungan kotoran adalah 10 meter lebih. Karena dengan jarak ini rembesan dari air limbah tidak bisa meresap sampai ke sumur atau mata air. Kesadaran masyarakat di Kalimantan Timur untuk menggunakan air minum dari sumur atau mata air yang berjarak lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan limbah terdekat

**Grafik 7.2**  
**Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Pembuangan Limbah**  
**Terdekat di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2015-2017 (meter)**



Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Berdasarkan Grafik 7.2 pada tahun 2017, jarak sumber air minum ke tempat pembuangan limbah lebih dari sama dengan 10 meter cukup tinggi yaitu sekitar 81,03 persen. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016 (75,84 persen). Namun masih ada penduduk Kalimantan Timur yang menggunakan air minum dari sumur atau mata air yang berjarak kurang dari 10 meter dari tempat pembuangan limbah terdekat (5,35 persen) dan bahkan masih ada yang tidak mengetahui jarak antara sumber air minum yang digunakan ke tempat pembuangan limbah terdekat yaitu sebesar 13,63 persen.

## **7.2 Kualitas Rumah Tinggal**

Rumah dikatakan layak sebagai tempat tinggal apabila rumah tersebut mempunyai atap, dinding dan lantai. Dari ketiga unsur tersebut juga dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penghuninya. Kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Kualitas rumah dapat dilihat dari jenis lantai, luas lantai, jenis atap, dan jenis dinding yang digunakan.

Ditinjau dari segi kesehatan jenis lantai yang digunakan rumah tangga juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Rumah yang memenuhi syarat kesehatan harus memiliki konstruksi lantai yang rapat air dan selalu kering, agar mudah dibersihkan dari kotoran dan debu, juga dapat menghindari kelembaban air tanah naik ke lantai. Semakin banyak rumah tangga yang mendiami rumah

## *Perumahan dan Lingkungan*

dengan lantai tanah akan berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Lantai tanah kurang baik karena dapat berdebu pada saat musim kemarau dan akan basah pada musim hujan. Lantai yang basah dan berdebu merupakan tempat timbulnya kuman penyakit dan menjadi media penularan berbagai jenis penyakit.

Berdasarkan data dari Susenas pada tahun 2017 di Kabupaten Kutai Timur persentase rumahtangga yang menghuni rumah berlantai tanah sebesar 0,32 persen, terjadi penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,47 persen.

Salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi rumah sehat diantaranya adalah luas lantai rumah/tempat tinggal per orang. Luas lantai tempat tinggal selain digunakan sebagai indikator menilai kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung juga dikaitkan dengan sistem kesehatan lingkungan tempat tinggal. Luas lantai erat hubungannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota rumah tangganya. Luas lantai bangunan rumah harus cukup untuk penghuni di dalamnya, artinya luas lantai bangunan tersebut harus disesuaikan dengan jumlah penghuninya.

Selain menggambarkan tingkat kesehatan, luas lantai juga dapat menggambarkan kesejahteraan rumahtangga. Menurut *American Public Health Association* yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 10 m<sup>2</sup>. Pada tahun 2017 di Kabupaten Kutai Timur terdapat 81,12 persen rumah tangga yang menghuni rumah dengan luas lantai perorang lebih dari 10 m<sup>2</sup>. Dengan luas lantai terluas merupakan kayu/papan kualitas tinggi sebesar 65,71 persen.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan sebagai tempat tinggal adalah penggunaan atap dan dinding. Persyaratan rumah sehat antara lain memiliki konstruksi bangunan cukup kuat. Salah satu ciri konstruksi bangunan yang cukup kuat adalah memiliki konstruksi atap yang cukup rapat dan tidak tiris. Jenis atap terluas yang digunakan rumah tangga di Kabupaten Kutai Timur adalah atap seng.

**Tabel 7.3**  
**Persentase Rumah Tangga menurut Kualitas Perumahan**  
**di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2017**

Kualitas Perumahan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Lantai Kayu/Papan Kualitas Tinggi	33,15	65,71
Luas Lantai perkapita > 10 m <sup>2</sup>	79,72	81,12
Atap Seng	85,92	88,13
Dinding Kayu atau batang kayu	74,52	78,09

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Jenis dinding rumah juga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Persyaratan rumah sehat salah satunya memiliki konstruksi dinding luar yang kuat. Jenis dinding yang baik adalah tembok atau kayu. Dinding rumah sebaiknya kering agar ruangan tidak menjadi lembab, karena dinding yang lembab

## *Perumahan dan Lingkungan*

menimbulkan resiko terjadinya penyakit. Sedangkan dinding bambu dan lainnya tidak baik untuk kesehatan.

Pada tahun 2017 persentase rumah tangga di Kabupaten Kutai Timur yang menggunakan bahan seng sebagai atap rumahnya sebesar 88,13 persen. Tempat tinggal yang berdinding dengan bahan kayu atau batang kayu 78,09 persen. Indikator jenis atap berupa seng mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2016, dan juga indikator jenis dinding berbahan kayu atau batang kayu mengalami peningkatan sampai dengan 78,09 persen jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2016 sebesar 74,52 persen (Tabel 7.3).

# DATA

Mencerdaskan Bangsa



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

JL.A.W.Syahrani, Bukit Pelangi-Sangatta 75611  
Telp. 0549-23223 Faks.0549-24745  
Email: bps64042bps.go.id, Homepage: <http://kutimkab.bps.go.id>